

	News Title : Diduga Ilegal, Bappebti Bersama Bareskrim Polri Gerebek Pertemuan Gamara di Kuta - Pancar Pos	
	Media Name : pancarpos.com	Journalist : ama, sur
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources :	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Hukum dan Kriminal	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Diduga Ilegal, Bappebti Bersama Bareskrim Polri Gerebek Pertemuan Gamara di Kuta

BadanPancarPOS.com · 6 Maret 2022 11:07 am

👤 225



Kot Jena Komodo 2021/04/06



Badung, PancarPOS | Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan pertemuan keluarga PT Gadem Maren Sejatera (Gamara) di Kuta, Badung – Bali, saat menggerak kegiatan ilegal itu, pada Sabtu (3/3/2022). Kegiatan tersebut dihentikan, karena dilacak telah menyelenggarakan pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti. Pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.



2021/04/06

Kegiatan penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Perindakan Bappebti, Aldison dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali. Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pihak terkait (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

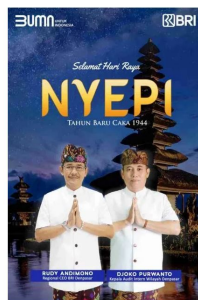


2021/04/06

Karena itu, acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara diduga telah merupakan kegiatan ilegal. Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengabaikan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tindakan ini diambil untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Baca Juga:

- DPO Diduga Tahanan Kabur dari Rutan Polres Jember Berhasil Ditangkap
- Terkai Protokol Kesehatan, Pemkab Badung Undang Aqwa Mambal
- Merasa Difitnah Secara Kaji, Law Firm Togar Situmorang Minta Polda Bali Beri Perlakuan Khusus
- Kacowa Adhiam Ditutupi, Dalam 7 Kali 24 Jam MDA dan PHDI Bali Terancam Perdada dan Pidana



2021/04/06

Selain itu, juga memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kantor Bappebti. Sayangnya sampai berita ini diturunkan pihak Gamara belum bisa memberikan klarifikasi terkait penggerakannya tersebut. auzjma